

BAB V

PENUTUP

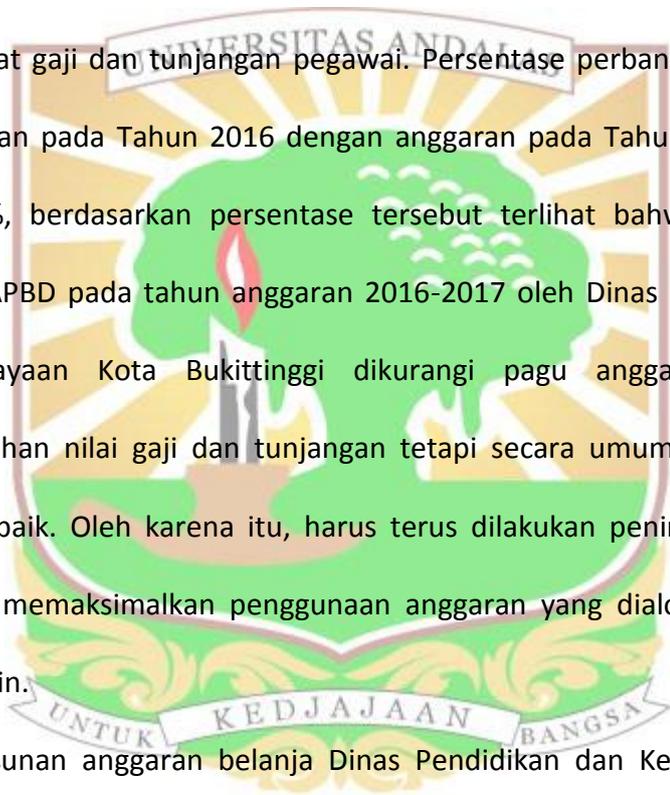
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Analisis Penyusunan dan Capaian Anggaran Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses penyusunan anggaran belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi ini dimulai dari pengumpulan usulan kegiatan dari masing masing bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. Program/kegiatan yang disusun setiap bidang didasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan serta strategi pembangunan selama lima tahun sebagai alat bantu melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pendidikan dan budaya dengan sebaik-baiknya. Adapun Prosedur Penyusunan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi yaitu, dari penyusunan RKPD, KUA, PPAS, SE Pedoman Penyusunan RKA, RKA-SPKD, RKA-PPKD hingga DPA-SKPD.
2. Faktor yang dipertimbangkan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Bukittinggi dalam penyusunan anggaran belanja adalah mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD kota yang selanjutnya dituangkan dalam

RENSTRA SKPD; selanjutnya, dasar untuk menentukan anggaran; dan cara untuk mencapai Standar Pelayanan yang Minimal (SPM) pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

3. Anggaran belanja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 dikelompokkan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Pada belanja langsung terdapat 14 program yang memuat 177 kegiatan yang dilaksanakan. Sementara pada belanja tidak langsung terdapat gaji dan tunjangan pegawai. Persentase perbandingan realisasi anggaran pada Tahun 2016 dengan anggaran pada Tahun 2017 sebesar 29,86%, berdasarkan persentase tersebut terlihat bahwa Penyerapan dana APBD pada tahun anggaran 2016-2017 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dikurangi pagu anggarannya karena perubahan nilai gaji dan tunjangan tetapi secara umum berada dalam posisi baik. Oleh karena itu, harus terus dilakukan peningkatan kinerja dalam memaksimalkan penggunaan anggaran yang dialokasikan sebaik mungkin.
4. Penyusunan anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 sudah sesuai dan berpedoman kepada kebijakan yang disediakan pemerintah. Adapun Prosedur Penyusunan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi yaitu, dari penyusunan RPKD, KUA, PPAS, SE Pedoman Penyusunan RKA, RKA-SPKD, RKA-PPKD hingga DPA-SKPD dengan baik. Serta jadwal penyusunan anggaran belanja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Bukittinggi



Tahun Anggaran 2017 juga telah sesuai dengan jadwal penyusunan anggaran belanja menurut Peraturan Pemerintah Daerah. Kemudian, penetapan angka anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi pada tahun 2017 sudah mempertimbangkan efisiensi belanja karena dana yang ada sudah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

5. Pencapaian anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2017 adalah sebesar 82%. Kegiatan secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik. Namun dari 177 kegiatan yang dilaksanakan terdapat 17 kegiatan yang persentase capaiannya dibawah 80%, 4 kegiatan yang persentase capaiannya dibawah 50% dan 4 kegiatan yang persentase capaiannya 0% atau tidak terealisasi.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas terdapat beberapa saran yang akan diajukan yang diharapkan dapat berguna bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dimasa yang akan datang, yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi seharusnya berkomitmen terhadap anggaran yang telah disusun. Sehingga, tidak ada lagi anggaran yang tidak terealisasi atau 0% untuk kedepannya.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi seharusnya menetapkan atau mengembangkan batas toleransi (batas atas dan batas

bawah) penyimpangan dari anggaran. Sehingga, penyimpangan yang diatas batas toleransi yang seharusnya dianalisis.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam mempertimbangkan penyusunan anggaran seharusnya lebih banyak lagi yang harus dipertimbangkan. Misalnya mempertimbangkan jumlah karyawan.

